



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Drs. BUSTAVIDIA, MM  
NIP. 19640501 199303 1 006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>3</b>
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	3
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	4
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	10
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	11
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	12
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	12
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	13
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	13
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	14
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	<b>15</b>
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	15
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.	

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya
- 3.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
  1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat diatasnya 15
  2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya 15

**BAB IV PENUTUP**

**16**

**BAB I**

**DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Sebagai lembaga teknis daerah, berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG  
DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.20.484.173.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.813.313.088,- atau 96,72 %, dengan uraian sebagai berikut :

**1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja  
pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (71,82)	101,15 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,9	105,69 %
II.	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Nilai evaluasi penyelenggaraan diklat	87	91,14	104,75 %
		Persentase ASN Prov. Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	6,2	7,1	114,52 %
		Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan	86	97,9	113,84 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>107,99 %</b>

**2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran**

**Tabel 2.2**

**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	1. Pemutakhiran aplikasi untuk proses pelaksanaan kediklatan serta pusat data untuk pengembangan kompetensi aparatur				15.215.913.599	14.715.505.861	96,71
I.	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		8 dokumen	8 dokumen	100%	22.111.750	21.543.900	97,43
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Menyiapkan draft Revisi Pergub Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu untuk integrasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat	4 dokumen	4 dokumen	100%	11.471.400	11.419.800	99,55
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	4 dokumen	100%	10.640.350	10.124.100	95,15
II.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	9.517.368.312	9.142.719.167	96,06
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Pengembangan jenis pelatihan berbasis pemecahan masalah	80 orang	80 orang	100%	9.170.172.712	8.798.840.167	95,95
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16 orang	16 orang	100%	313.991.650	310.729.600	98,96
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 dokumen	2 dokumen	100%	16.969.400	16.950.800	99,89
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		14 dokumen	14 dokumen	100%	16.234.550	16.198.600	99,78
III.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	148.336.850	147.002.908	99,10
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		153 stel	153 stel	100%	68.450.000	67.402.500	98,47
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		13 orang	13 orang	100%	79.886.850	79.600.408	99,64
IV.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	972.784.565	964.028.482	99,10
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		4 jenis	4 jenis	100%	101.797.500	101.257.500	99,47

	Bangunan Kantor							
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	100%	212.271.500	211.481.000	99,63	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	9 jenis	100%	70.699.000	70.640.050	99,92	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100%	15.000.000	14.490.000	96,60	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 dokumen	81 dokumen	124,6%	573.016.565	566.159.932	98,80	
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>887.910.100</b>	<b>866.715.685</b>	<b>97,61</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100%	64.438.000	59.483.900	92,31	
2	Pengadaan Mebel	60 unit	60 unit	100%	177.120.500	176.490.000	99,64	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	100%	551.351.600	537.323.285	97,46	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100%	95.000.000	93.418.500	98,34	
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>2.279.547.074</b>	<b>2.203.652.124</b>	<b>96,67</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	1544 surat	154,4%	20.274.400	20.092.250	99,10	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.000 kwh 6.000 m3 50 Mbps 1 rekening	370.000 kwh 6.000 m3 50 Mbps 1 rekening	100%	651.040.400	633.880.774	97,36	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47 orang	47 orang	100%	1.608.232.274	1.549.679.100	96,36	
<b>VII.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>1.387.854.948</b>	<b>1.369.843.595</b>	<b>98,70</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	100%	247.950.000	241.886.451	97,55	

2	Pemeliharaan Mebel		85 unit	85 unit	100%	34.920.000	34.797.000	99,65
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 unit	2 unit	100%	254.060.000	244.068.444	96,07
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		82 unit	82 unit	100%	850.924.948	849.091.700	99,78
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					<b>5.268.259.991</b>	<b>5.097.807.227</b>	<b>96,76</b>
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>150 orang</b>	<b>160 orang</b>	<b>106.6%</b>	<b>650.835.900</b>	<b>641.767.616</b>	<b>98,61</b>
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		150 orang	160 orang	106,6%	587.269.150	579.462.086	98,67
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan		1 dokumen	1 dokumen	100%	63.566.750	62.305.530	98,02
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>20 JP/Tahun</b>	<b>20 JP/Tahun</b>	<b>100%</b>	<b>4.617.424.091</b>	<b>4.456.039.611</b>	<b>96,50</b>
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		120 orang	120 orang	100%	123.704.200	122.194.229	98,78
2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		3 dokumen	3 dokumen	100%	374.332.071	344.825.204	92,12
3	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		1 dokumen	1 dokumen	100%	82.551.820	79.610.167	96,44
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Fungsional = 120 orang Manajerial = 531 orang	120 orang 562 orang	100% 105,8%	3.885.034.500	3.762.796.711	96,85
5	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,		3 dokumen	3 dokumen	100%	151.801.500	146.613.300	96,58

	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
<b>Jumlah</b>						<b>20.484.173.590</b>	<b>19.813.313.088</b>	<b>96,72</b>

**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>			
<b>I.</b>	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>IV.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pengadaan Mebel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>VII.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pemeliharaan Mebel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dilakukan pemeliharaan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran	Tidak ada
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	<b>Teknis</b>			
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Untuk pengembangan kompetensi ASN memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar	Mengembangkan pelatihan dengan pola baru seperti blended learning dan e-learning	Tidak ada
5	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

### **3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Seluruh kegiatan mempunyai keluaran yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sesuai target program, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- b. Program Pengembangan Sumber daya Manusia kegiatan :
  1. Pengembangan Kompetensi Teknis
  2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Seluruh kegiatan mempunyai keluaran yang berorientasi kepada pencapaian target kinerja program yaitu Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun, sehingga akan meningkatkan capaian program. Dan juga untuk pencapaian target meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

## **2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan target pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis**  
**BPSDM Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemutakhiran aplikasi untuk proses pelaksanaan kediklatan serta pusat data untuk pengembangan kompetensi aparatur	Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumbar	Mempermudah proses penerimaan peserta diklat serta menyediakan data dan informasi pelaksanaan diklat, data alumni dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur
2	Menyiapkan draft Revisi Pergub Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu untuk integrasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di seluruh OPD lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibawah koordinasi BPSDM.
3	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan pola Blended Learning dan E-Learning	Peraturan kepala LAN Nomor 10 Tahun 2021, tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Pemanfaatan teknologi untuk pelatihan secara online untuk menyikapi keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN.

### **2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tidak ada.

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan :

**Tabel 2.8**  
**Penghargaan yang Diraih Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan, sehingga anggaran terkait dengan tugas pembantuan nihil.

**Tabel 3.1**

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber: Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2022*

**3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.
  - a. Permasalahan (Nihil)
  - b. Upaya Penyelesaian (Nihil)
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya
  - a. Permasalahan (Nihil)
  - b. Upaya Penyelesaian (Nihil)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.